



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD TUGUREJO
SUB UNIT KERJA : RSUD TUGUREJO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDRO SUPRAYITNO**
2. Jabatan : **DIREKTUR RSUD TUGUREJO**
3. NHK : **109361**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/100 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/200 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/100 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 30 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 170 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 187 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 122.185.515

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 867.885.515

III. HUTANG Rp. 58.479.930



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

809.405.585

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.